

ANALISIS ISI MEDIA BERITA ONLINE TENTANG PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI PULAU BALI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Ni Md. Anggita S. Mahadewi

Program Studi Sosiologi, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia

e-mail: snimadeanggita@yahoo.com

Abstrak

Pro dan kontra yang menyelimuti pengembangan wisata *syariah* di Bali banyak diberitakan melalui media berita online Indonesia. Wisata *syariah* yang kental dengan nuansa Islami, sulit untuk diterima masyarakat Bali yang memiliki kearifan lokal berbasis Hindu. Tulisan ini mengkaji empat media berita online yang menyajikan berita terkait wisata *syariah* di Bali, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi berita tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa, secara khusus pengembangan wisata *syariah* di Bali belum dapat dilaksanakan karena perbedaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki penduduk Bali. Secara umum pengembangan wisata *syariah* tetap dapat dilaksanakan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kata kunci : Provinsi Bali, wisata *syariah*, media berita online

Abstract

Pro and contra that surrounds the development of tourism in Bali sharia many online news media reported via Indonesia. Travel sharia is thick with Islamic nuance, difficult to accept the Balinese people who have local knowledge-based Hindu. This paper examines four online news media that presents news related to sharia travel in Bali, which then performed an analysis of the content of the news. Based on the analysis showed that, in particular the development of tourism in Bali sharia can't be implemented because of differences in cultural values and local knowledge possessed Bali residents. In general the tourist development of sharia still be carried out in other areas in Indonesia.

Keywords: Bali province, sharia travel, online news media

PENDAHULUAN

Sejak beberapa tahun terakhir berkembang wacana mengenai wisata *syariah*. Indonesia yang merupakan

salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menyambut dengan baik wacana tersebut. Sepanjang tahun 2015 wacana mengenai pengembangan wisata

syariah di Indonesia diperbincangkan baik dalam tataran pemerintahan maupun media massa dalam hal ini adalah media berita online.

Kementerian Pariwisata memastikan ada 13 provinsi di Indonesia yang sudah siap sebagai destinasi wisata *syariah* yakni, NTB, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Sindo News, 2015). Menarik untuk dianalisis ketika Bali menjadi salah satu provinsi yang disebutkan. Pro dan kontra dari berbagai pihak terhadap kebijakan tersebut bermunculan dan dimuat dalam media berita online. Tulisan ini menganalisa isi dari pemberitaan media berita online tentang pengembangan wisata *syariah* di Bali, dan mengkajinya menggunakan konsep dan teori dari sosiologi pembangunan.

BAGIAN INTI: ANALISIS BERITA PRO & KONTRA PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI BALI

Munirah dalam (Alim, Riansyah, Karimatul, Muslim, & Adityawarman, 2015) menuliskan, *Utilizing the World Tourism Organization* (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan Muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data *Global Muslim Traveler*, pariwisata *syariah* telah diperkenalkan sejak tahun 2000. Pariwisata *syariah* merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan

termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari *Allah*.

Wisata *Syariah* atau *Halal Toursim* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan *syariah*. Peluncuran wisata *syariah* bertepatan dengan kegiatan Indonesia *Halal Expo* (Indhex) 2013 & *Global Halal Forum* yang digelar pada 30 Oktober-2 November 2013. Dengan diluncurkannya wisata *syariah* ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi turis Muslim.

Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas penunjangnya juga harus sesuai standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Arby, 2015). Terdapat karakteristik pariwisata *syariah* yakni, lokasi yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam. Penerapan sistem transportasi, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*. Konsumsi harus halal baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan dalam hotel berjalan sesuai dengan prinsip *syariah*, pelayanan termasuk seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah (Alim, Riansyah, Karimatul, Muslim, & Adityawarman, 2015)

Pengembangan wisata *syariah* tersebut banyak diberitakan oleh media berita online, sebagai berikut: Media JPNN.com, 2015, memberitakan wacana penerapan wisata *syariah* di Bali mencuat sejak ditetapkannya 13 provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata *syariah* dan Provinsi Bali merupakan salah satunya. Hal tersebut

disampaikan Kasubdit Korporasi Direktorat MICE dan Minat Khusus Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Taufik Nurhidayat, Minggu (22/11). Salah satu pertimbangan Bali bisa menerapkan konsep wisata *syariah* adalah karena terdapat Bayt Kaboki Hotel merupakan hotel *syariah* pertama dan satu-satunya di Bali.

Selanjutnya, media Kabdewata.com, 2015, memberitakan Masyarakat Ekonomi Syariah pusat meminta para pengusaha di Bali yang tergabung dalam MES Bali untuk merumuskan serta mewujudkan pariwisata *syariah*. Ketua MES pusat mengatakan, sekarang ini negara-negara di dunia sedang mengembangkan pariwisata *syariah*. Selain itu wisatawan pun banyak yang menginginkan busana, makanan, kesehatan, maupun tempat hiburan yang Islami, dan hal tersebut merupakan peluang bisnis yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dadang Hermawan Ketua MES Daerah Bali menyatakan bahwa Bali tidak terlepas dari pariwisata dan sebagian wisatawan yang datang banyak orang Muslim. Menurutnya, konsep ekonomi *syariah* merupakan konsep bagi semua orang bukan untuk orang Muslim saja.

Melalui dua berita online tersebut dapat disimpulkan bahwa, pariwisata *syariah* di Bali merupakan program lanjutan dari program wisata *syariah* nasional. Bali dianggap memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata *syariah*, karena terdapat hotel sesuai standar *syariah*. Selain itu nilai-nilai *syariah* berlaku universal untuk semua kelompok masyarakat tidak terbatas pada perbedaan agama dan budaya. Pariwisata *syariah* telah menjadi trend

global, selain karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, juga karena pariwisata *syariah* dapat menjadi peluang bisnis yang besar demi pembangunan pariwisata Indonesia.

Berbeda dengan dua berita sebelumnya, media Liputan6.com, 2015 memberitakan reaksi penolakan wacana penerapan pariwisata *syariah* di Bali terus bermunculan. Salah satu kelompok yang menolak adalah Aliansi Hindu Muda Jembrana. Puluhan anggotanya turun ke jalan menolak wacana tersebut pada 25 November 2015. Mereka menggelar aksi damai dan menyampaikan lima poin pernyataan sikap. Mereka juga menyebutkan sebagai bagian dari NKRI, Bali telah memiliki kearifan lokal yang selama ini menopang laju pertumbuhan pariwisata dan perekonomian Bali.

"Ekonomi Pancasila sudah pas banget. Kita punya desa adat yang menjadi harga mati bagi Bali. Kalau desa lain silakan lah," ujar Koordinator aksi Kadek Budiarta. Wacana pariwisata *syariah* bergulir seiring terpilihnya Lombok sebagai destinasi *syariah* dalam kompetisi internasional. Bali yang berlokasi dekat Lombok dinilai juga potensial.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati, menilai Bali menjadi destinasi pariwisata internasional selain karena keindahan alamnya, juga karena wisata budaya. Masih banyak daerah yang memiliki potensi yang lebih untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata *syariah*. "Indonesia ini sangat luas sekali, seperti Aceh, Nusa Tenggara

Barat atau Lombok. Dari situ kita lihat sinergitas sebagai pilihan pariwisata Indonesia. Mulai destinasi wisata *syariah* hingga destinasi wisata budaya," kata Tjokorda (Ali).

Dalam media BeritaBali.com, 2015, diberitakan setelah sebelumnya dituding ingin menggarap wisata desa *syariah* di Bali, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dr. Dadang Hermawan membantah keras pernyataan tersebut. Setelah mendapat berbagai masukan, ia menilai pariwisata *syariah* tidak tepat diterapkan di Bali. Hak itu disampaikan Dadang dalam diskusi bersama sejumlah LSM, tokoh lintas agama beserta sejumlah media massa di kediaman Ketua Yayasan Sandhi Murti, Ngurah Harta di Renon, Denpasar.

"Saya tidak ada bicara soal itu. Seperti dalam pemberitaan tidak ada menyebut menggarap Desa *Syariat*. Saya hanya ambil sample kecil itu. Oleh karena itu kita akan ubah program kerja itu. Saya waktu itu hanya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat," ucap Dadang dalam diskusi. Setelah mendapat sejumlah masukan, Dadang menilai pariwisata *syariah* tidak tepat diterapkan di Bali dan akan memunculkan sektarian serta inklusifitas terhadap ajaran agama tertentu. Untuk itu, ia berjanji akan mengusulkan untuk merubah program tersebut.

"Kita akan hindari penggunaan simbol agama di Bali dan merubah program kerja untuk mengusulkan di Bali tidak lagi menggunakan kata 'syariat', karena sangat sensitif di Bali. Kita hanya mengusulkan dan tapi tidak dalam posisi menolak. Apalagi tidak ada instruksi khusus yang

menyampaikan bahwa Bali harus pariwisata *syariat*," jelasnya. Dalam diskusi tersebut, secara tegas menolak pariwisata *syariah* jika dijadikan komoditi di Bali. Lantaran dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi masyarakat.

Salah satu peserta diskusi juga menyebutkan, "keragaman perlu dipahami secara luas. Ini kita tolak usulan dari Menteri Pariwisata yang mempersempit pariwisata di Bali," kata Hasan salah satu warga muslim di Bali yang seraya juga mengakui *syariah* itu bahasa Islam dan sangat riskan. Dalam kesempatan yang sama, Adnyana dari Jaringan Hindu Nusantara juga meminta biarkan di Bali berjalan seperti sekarang, jangan diotak-atik dengan ajaran agama. Biarkan di Bali jangan dibawa-bawa bau agama dan pariwisata *syariah* tidak bisa dijalankan di Bali.

Melalui berita-berita dari sudut pandang pihak yang menolak, program wisata *syariah* tidak cocok untuk dikembangkan di Bali, karena Bali telah memiliki basis pariwisata tersendiri yakni wisata budaya yang berlandaskan agama Hindu. Walaupun dikatakan bahwa pariwisata *syariah* sedang berkembang, namun tetap saja sebagian besar masyarakat Bali menolak usulan tersebut. Kontroversial tersebut berakhir dengan damai karena Ketua MES Bali telah meminta maaf dan melakukan dialog dengan segenap elemen masyarakat Bali.

Dalam kajian teori pembangunan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur pembangunan sebuah negara yakni, kekayaan rata-rata penduduknya, pemerataan sumber daya, kualitas kehidupan, kerusakan

lingkungan, keadilan sosial dan kesinambungan (Arief, 1995). Apabila lima unsur ini telah terpenuhi artinya pembangunan suatu negara dikatakan berhasil, namun sangat sulit untuk memenuhi seluruhnya. Terlebih lagi di Indonesia dimana masyarakatnya sangat majemuk.

Max Weber melalui karyanya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904), mengartikan efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial, dan membedakan karakteristik kebudayaan (Upe, 2010, hal. 213-214). Dalam program pariwisata *syariah* nilai-nilai agama sangat kental, dimana terdapat beberapa unsur dalam pariwisata yang dirancang agar sesuai dengan nilai-nilai Islami seperti, lokasi yang sesuai dengan kaidah Islam, transportasi yang menerapkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, konsumsi halal, dan fasilitas hotel yang berjalan dengan prinsip *syariah*.

Selain nilai-nilai agama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dorongan untuk berprestasi juga memiliki peran penting. David McClelland mengemukakan konsep mengenai dorongan berprestasi (*n-Ach*). Konsep ini mengemukakan bahwa dorongan untuk berprestasi ini tidak sekedar untuk meraih imbalan material, namun untuk kepuasan batin melakukan pekerjaan dengan sempurna (Arief, 1995, hal. 22-24).

Penelitian maupun tulisan tentang dorongan berprestasi terkait dengan unsur-unsur agama telah banyak dilakukan, seperti beberapa tulisan berikut; tulisan tentang agribisnis *syariah* yang berusaha dipahami

melalui pendekatan sistem agribisnis. Tulisan ini menerangkan bahwa keinginan berprestasi merupakan fungsi bagi keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan (Maman, 2014). Selanjutnya, terdapat tulisan tentang metode pengantasan kemiskinan melalui media dakwah dengan pendekatan salah satu Teori Mc.Clelland, yakni kebutuhan akan berprestasi (*n-Ach*). Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa teori *n-Ach* Mc.Clelland dapat dimanifestasikan ke dalam gaya hidup yang menjadi ciri kaum *entrepreneur*, guna mengentaskan kemiskinan yakni; dorongan untuk mengambil resiko, kemauan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dorongan untuk memperdalam pengetahuan, memiliki naluri dan kapabilitas untuk rencana jangka panjang (Anwar, 2011).

Dua tulisan tersebut menggambarkan bahwa dorongan berprestasi dan unsur-unsur agama dapat mempengaruhi, bahkan dapat menjadi metode untuk meningkatkan kegiatan perekonomian demi mengentaskan kemiskinan.

Dorongan berprestasi juga terlihat secara implisit pada program wisata *syariah* di Indonesia. Pada ajang *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015* (WHTS15) di Abu Dabi, Uni Emirat Arab pada 19-21 Oktober 2015 lalu, Indonesia meraih penghargaan sebagai pemenang di tiga kategori yakni *World's Best Halal Tourism Destination* (Lombok), *World's Best Halal Honeymoon* (Lombok) dan *World's Best Family Friendly Hotel* (Sofyan Hotel Betawi, Jakarta) (Halalfocus.com, 2015).

Tentunya prestasi ini patut dibanggakan karena Indonesia berhasil mengalahkan beberapa negara lainnya, seperti Malaysia, Abu Dabi, Thailand, Mesir, Maroko, Iran dan Turki pada tiga kategori tersebut. Prestasi ini yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, namun seperti yang diungkapkan oleh Bert F. Hoselitz bahwa faktor kondisi lingkungan juga mempengaruhi pembangunan (Arief, 1995, hal. 31-32).

Bali memiliki kearifan lokal diusung salah satunya yakni konsep '*Ajeg Bali*'. Kata '*ajeg*' mengandung makna kuat dan tegak. '*Ajeg*' artinya harus kembali ke asal, kembali ke Bali yang murni dan damai. Kebudayaan Bali juga identik dengan nuansa Hindu, dapat dilihat ketika orang Bali Hindu mengucapkan salam *Om Swastiasu* dan *Om Shanti, Shanti, Shanti, Om* dimana kata-kata tersebut merupakan bahasa *Sansekerta*. Tidak jauh berbeda dengan umat Muslim dengan salam *Assalam'alaikum* dan *Walaikum'sallam* (Nordholt, 2010, hal. 67-70).

Secara keseluruhan melalui kajian sosiologi pembangunan, pengembangan wisata *syariah* di Bali menyiratkan bahwa agama memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki dorongan untuk berprestasi ditingkat internasional. Tentunya upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia patut diapresiasi, namun perlu adanya pertimbangan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

RINGKASAN

Secara umum wisata *syariah* masih tetap dapat dijalankan di Indonesia, hanya saja pemerintah harus lebih teliti dalam memilih daerah-daerah yang dijadikan destinasi. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki unsur-unsur agama dan budaya yang berbeda-beda, sehingga apabila tidak berhati-hati program ini dapat memicu konflik di masyarakat. Pada hakikatnya agama memiliki daya untuk menyatukan masyarakat, terlebih lagi Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Masih banyak daerah di Indonesia yang belum terekspose, yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan objek pariwisata dan perlu untuk dikembangkan. Hal tersebut akan membuat Indonesia memiliki beragam pilihan wisata, seperti pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata *syariah*. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk menjaga dan melestarikan yang sudah ada dan berusaha membangun wisata-wisata baru yang tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alim, H. T., Riansyah, A. O., K. H., Muslim, I., & Adityawarman. (2015). Analisis Potensi

Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta.
1.

- Anwar, Husen Saeful. (2011). Dakwah Pengentasan Kemiskinan dalam Pendekatan Teori David Mc.Clelland, *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, 5, 17. Dipetik 22 Januari 2018, dari Website Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/371>
- Arby, I. (2015). *Wisata Syariah Halal Tourism*. Dipetik Desember 4, 2015, dari Website Academia Edu: http://www.academia.edu/5841658/Wisata_Syariah_Halal_Tourism
- BeritaBali.com. (2015, November 23). *Ketua MES: Pariwisata Syariah Tidak Tepat Dijalankan di Bali*. Dipetik Desember 3, 2015, dari Web site Berita Bali : <http://beritabali.com/read/2015/11/23/201511230003/Ketua-MES---Pariwisata-Syariah-%C4%81%E2%82%AC%CB%87Tidak-Tepat-Dijalankan-di-Bali.html>
- Halalfocus.com. (2015). *Halal Trevel Award 2015*. Dipetik Desember 6, 2015, dari <http://halalfocus.net/>
- JPNN.com. (2015, 11 25). *Gubernur: Konsep Wisata Syariah di Bali Usulan Aneh*. Dipetik Desember 3, 2015, dari Website JPNN : [1/25/340691/Gubernur:-Konsep-Wisata-Syariah-di-Bali-Usulan-Aneh!-](http://www.jpnn.com/read/2015/11/25/340691/Gubernur:-Konsep-Wisata-Syariah-di-Bali-Usulan-Aneh!-)
- Kabardewata.com. (2015, November 17). *MES Minta Pengusaha Bali Baut Pariwisata Syariah*. Dipetik Desember 4, 2015, dari Website Kabar Dewata: <http://kabardewata.com/headlines/mes-minta-pengusah-bali-buat-pariwisata-syariah.html>
- Liputan 6.com. (2015, November 23). *Penolakan Wisata Syariah Di Bali Manguat*. Dipetik Desember 4, 2015, dari Web site Liputan 6 Regional: <http://regional.liputan6.com/read/2375511/penolakan-wisata-syariah-di-bali-menkuat>
- Maman, Ujang. (2014). Memahami Agribisnis Syariah berdasarkan Pendekatan Sistem Agribisnis, *Agribusiness Journal*, 8, 1. Dipetik 22 Januari 2018, dari Website Agribusiness Journal: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/agribusiness/article/view/5129>
- Nordholt, H. S. (2010). *Bali Benteng Terbuka 2995-2005: Otonomi Daerah, Demokrasi Eelektoral, dan Identitas Defensif*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sindo News. (2015). *13 Provinsi Siap Jadi Tujuan Wisata Syariah*. Dipetik Desember 4, 2015, dari Web site Sindo News: <http://nasional.sindonews.com/read/994208/162/13-provinsi-siap-jadi-tujuan-wisata-syariah-1430102126>

Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.